

ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA

Salbia Taher¹⁾, Antje Tuasela²⁾

¹Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jambatan Bulan
Email: salbiataher1010@gmail.com

²Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jambatan Bulan
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional expenditure on economic growth in Mimika Regency. The research used comparative causal method, which intended to measure the effect or investigate the effects caused by the independent variable (regional expenditure) to the dependent variable (economic growth). Data collected by interview techniques, literature study and documentation. To determine the effect of regional expenditure on economic growth in Mimika Regency, a simple linear regression analysis tool is occupied. The results showed that there was no significant correlation between regional expenditure and economic growth.. Bivariate Person correlation analysis results show r-count value (0.371) < r-table value (0.632) then H_0 is accepted, meaning that there is no significant correlation between regional expenditure with economic growth in Mimika Regency. This indicates that the fiscal policy of the regional government through the Mimika Regency APBD, especially in the aspect of regional expenditure has not been able to significantly encourage economic growth of the Mimika Regency.

Keywords: Regional Expenditure, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kondisi perekonomian menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang prestasi pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut

untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi.

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang cukup berpengaruh adalah pengeluaran pemerintah. Sebagai organisasi, pemerintah daerah mempunyai pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja langsung maupun tidak langsung), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan daerah yang dimiliki dan diperoleh pemerintah daerah perlu dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah. Alokasi sumberdaya keuangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah harusnya dalam tahap implementasi memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu yang tercermin pada angka PDRB. Sebagai gambaran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika periode 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,10	6,80	4,93	4,10	6,79	6,40
2	Pertambangan dan Penggalian	-18,61	-7,52	9,82	-1,59	6,34	13,65
3	Industri Pengolahan	3,60	2,63	4,28	4,01	6,40	7,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	14,03	7,80	5,52	0,00	3,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23	2,50	4,90	1,10	2,30	2,42
6	Konstruksi	1,61	5,47	8,28	9,14	11,86	12,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,46	9,87	8,44	6,55	7,11	7,20
8	Transportasi dan Pergudangan	8,70	7,24	6,49	8,80	8,80	7,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	15,20	11,91	7,92	6,17	6,19

Lanjutan Tabel 1.

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016
----	----------------	------	------	------	------	------	------

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10	Informasi dan Komunikasi	9,69	7,02	7,65	5,27	4,43	4,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-12,70	1,52	14,60	7,82	1,13	5,61
12	Real Estate	11,66	3,05	9,88	9,07	5,16	5,20
13	Jasa Perusahaan	17,06	7,25	5,86	4,66	2,78	3,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,60	16,09	2,42	6,58	10,61	10,80
15	Jasa Pendidikan	6,44	3,94	6,77	6,44	4,15	4,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	5,81	10,04	9,28	8,87	9,80
17	Jasa lainnya	2,84	9,59	7,78	10,38	6,30	6,40
PDRB		-21,83	-15,20	9,48	-0,55	6,48	11,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun. Melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika sebagaimana tergambar dalam PDRB periode 2011-2016 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dan tidak menggembirakan karena cenderung negatif, hanya pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan positif.

Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan berbagai sektor kehidupan masyarakatnya. Konsekuensi logisnya, pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai oleh besaran PDRB. Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari (Todaro, 2000).

Masalah pengalokasian pengeluaran pemerintah ini merupakan pilihan yang cukup sulit, di mana pemerintah harus menentukan komponen mana saja dari pengeluaran tersebut yang harus dikurangi atau ditambah dalam menciptakan anggaran pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagai gambaran besarnya realisasi pengeluaran daerah menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Mimika periode 2011- 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Mimika Periode 2011- 2016

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)
2011	539.277.803.066	814.891.675.796	1.354.169.478.862
2012	462.340.822.868	871.477.270.700	1.439.597.048.400
2013	531.574.029.920	793.630.294.883	1.325.204.324.803
2014	610.599.673.355	1.116.724.892.037	1.727.324.565.392
2015	650.390.483.070	1.598.800.813.316	2.249.191.296.386
2016	793.367.883.769	1.827.171.914.098	2.620.539.797.867

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Mimika Tahun 2017*

Selama periode 2011-2016 perkembangan anggaran belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal menarik yang perlu diperhatikan adalah pada perkembangan PDRB dari periode yang sama. Pada tahun 2014 belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.727.324.565.392 dari tahun sebelumnya (2013) sebesar Rp 1.325.204.324.803 atau naik sebesar 0,3%. Namun pada tahun yang sama pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika mengalami penurunan sebesar -0,55%. Kondisi yang sama terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi seperti ini merupakan suatu fenomena baru dan menarik untuk dikaji karena di satu sisi upaya meningkatkan anggaran belanja pemerintah sebagai alat kebijakan fiskal dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika ternyata direspon secara kontra produktif oleh PDRB, sehingga tidak dapat dipersalahkan apabila opini yang berkembang bahwa kebijakan-kebijakan fiskal yang dilancarkan oleh pemerintah daerah pada

periode tersebut tidak tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat terwujud.

Dari uraian dan data di atas tercermin suatu kondisi yang menggambarkan adanya indikasi perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah daerah yang cukup tinggi namun tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang sepadan dan bahkan cenderung jauh dari harapan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *"Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika"*.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Menurut Dumairy (1999: 56), pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam kelompok peran yaitu:

- Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang ada agar

pemanfaatan bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.
- d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan kesulitan penyesuaian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memacu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang

harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (1993: 169), teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, diantaranya:

- a. Pengeluaran pemerintah secara mikro

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu:

- a) Perubahan permintaan akan barang publik.
 - b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan.
 - c) Perubahan kualitas barang publik.
 - d) Perubahan harga faktor-faktor produksi.
 - b. Pengeluaran pemerintah secara makro
- Ada beberapa teori yang mendasari pengeluaran

pemerintah secara makro antara lain:

a) Teori Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

b) Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal,

tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Di tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

c) Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutny apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam

masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

Dimana:

PkPP = pengeluaran pemerintah perkapita

PPk = pendapatan nasional perkapita

1,2,...,n = indeks waktu (tahun)

Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organic theory of state*. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu:

- 1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- 2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
- 3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- 4) Perkembangan demografi.
- 5) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan

kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar.

- d) Teori Peacock dan Wiseman
Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

daerah. Dalam pasal 31 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan

terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Tenaga kerja;
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan;
- r. Pemuda dan olah raga;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Pemerintahan umum;
- u. Kepegawaian;
- v. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. Statistik;
- x. Arsip; dan
- y. Komunikasi dan informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan sumber daya mineral;
- d. Pariwisata;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketentraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan; dan
- i. Perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung;
Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai;
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

- b) Bunga;
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c) Subsidi;
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d) Hibah;
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e) Bantuan sosial;
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

- bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f) Belanja bagi hasil;
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g) Bantuan keuangan;
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h) Belanja tidak terduga.
Belanja tidak merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- b. Belanja langsung.
Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a) Belanja pegawai;
Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b) Belanja barang dan jasa;
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- a) Belanja modal.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2006: 9) pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan formula:

$$g = \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} \times 100$$

Keterangan :

g = tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi

GDP_1 = (*gross domestic product*) atau produk domestik bruto pada suatu tahun (tahun 1).

GDP_0 = (*gross domestic product*) atau produk domestik bruto pada tahun sebelumnya (tahun 0)

Menurut Sukirno (2006: 243), terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Teori pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok

barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

b. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Abramovits dan Solow dalam teori pertumbuhan Neo Klasik mengemukakan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki

kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang

dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah:

a. Korupsi

Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan.

b. Laju inflasi

Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap resiko kenaikan harga tinggi.

c. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi.

d. Kenaikkan harga bahan bakar minyak

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan "*multiplayer effect*" menyeluruh terhadap perekonomian.

e. Situasi keamanan yang tidak kondusif

Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya (investasi jangka pendek maupun jangka panjang) jika keamanan tidak stabil.

Hubungan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mangkoesoebroto, (1993; 169) teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah

beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal komparatif. Menurut Mudrajat Kuncoro (2009:15), studi kausalitas selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain metode

penelitian ini melihat adanya pengaruh atau menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas (belanja daerah) kepada variabel terikat (pertumbuhan ekonomi).

Daerah dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika dengan obyek penelitian adalah pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- Wawancara (*interview*)**
Wawancara dilakukan dengan unsur pimpinan dari instansi terkait untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- Studi pustaka (*library research*)**
Studi pustaka yaitu dengan pengumpulan data berbagai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang relevan untuk dijadikan landasan dalam menganalisis masalah.
- Dokumentasi**, dengan mencari data mengenai variabel penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, laporan, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Instrumen Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika, digunakan alat analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

X = Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dalam penelitian ini belanja daerah merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun perkembangan belanja pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2008 – 2017**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)
-------	---------------------

2008	1.083.787.800.000
2009	1.412.016.986.000
2010	1.358.761.167.610
2011	1.354.169.478.862
2012	1.439.597.084.400
2013	1.325.204.324.803
2014	1.727.324.565.392
2015	2.249.191.296.386
2016	2.620.539.797.867
2017	2.248.986.816.599

Sumber: BPKAD Kabupaten Mimika, 2018

Dari tabel 3. memperlihatkan perkembangan belanja daerah Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni tahun 2008 – 2017. Belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan total belanja sebesar Rp 2.620.539.797.867 dan belanja daerah terendah terjadi pada

tahun 2008 dengan total belanja sebesar Rp 1.083.787.800.000.

Dari hasil analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel belanja daerah terhadap variabel laju PDRB. Hasil analisis yang diperoleh dengan bantuan SPSS versi 16 *for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-19.806	18.406		-1.076	.313
Belanja Daerah	.012	.011	.371	1.130	.291

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen adalah:

$$Y = -19,806 + 0,012 X$$

Nilai konstanta dan koefisien dari hubungan fungsional di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -19,806 berarti bahwa laju PDRB dipengaruhi oleh variabel lain selain belanja daerah sebesar -19,8%
- Koefisien belanja daerah sebesar 0,012 menunjukkan bahwa jika belanja daerah mengalami peningkatan 1 miliar, maka akan

menyebabkan peningkatan laju PDRB sebesar 0,012%.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja daerah

terhadap laju PDRB adalah dengan melihat nilai *R square* pada output SPSS sebagai berikut:

Tabel 5.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 ^a	.138	.030	16.13733

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, tahun 2019

Hasil diatas menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,138. Nilai ini berarti bahwa pengaruh belanja daerah terhadap laju PDRB Kabupaten Mimika adalah sebesar 13,8%, sedangkan 86,2% laju PDRB dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukan bahwa belanja daerah mempunyai namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mimika terutama dalam aspek pengeluaran pemerintah belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan

ekonomi yang lebih produktif atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan. Namun pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika lebih banyak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif dan mengarah kepada tujuan konsumtif sehingga tidak mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB kabupaten Mimika sebesar 86,2% dibentuk oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan data yang diperoleh, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Mimika pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan, yaitu mencapai 85,47 persen (angka ini menurun dari 86,34 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,78 persen (meningkat dari 2,24 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 2,51 persen (naik dari 2,26 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,85 persen (turun dari 1,97 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 1,84 persen.

Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai sebuah organisasi, diharapkan dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan untuk menggerakkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika, sehingga belanja daerah dapat membantu secara signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mimika terutama dalam aspek pengeluaran pemerintah belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, disarankan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika antara lain:

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja yang sifatnya konsumtif dengan belanja yang bersifat produktif dan lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.
- b. Pengeluaran pemerintah di masa yang akan datang harus lebih besar untuk belanja modal/pembangunan misalnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur karena dengan terciptanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung : Alfabeta.

REFERENSI

- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Edi Riadi, 2015, *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*, Andi, Yogyakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis, Edisi 3*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 4*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2001, *Ekonomi Publik, Edisi 3*, BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N.Gregory, 2006, *Teori Makro Ekonomi. Edisi 6, Terjemahan*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Todaro, Mikhael. P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga, edisi ketujuh*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan*

